

KIK
Per 23/01
Wid
P

SKRIPSI

PUDIO YUNANTO WIDIAS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI BIDANG KESELAMATAN KERJA PADA PT. NESTLE INDONESIA WARU - SIDOARJO



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
DI BIDANG KESELAMATAN KERJA PADA PT. NESTLE
INDONESIA WARU-SIDOARJO**

Diajukan


Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat


Untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing

Penulis


Dr. Maarten L. Souhoka SH,MS.


Pudio Yunanto Widas

130. 873. 453

039313810

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Keselamatan kerja bertujuan melindungi kepentingan pekerja dari adanya risiko-risiko kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari. Keselamatan kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh syarat-syarat keselamatan yang optimal menyangkut fasilitas kelengkapan keselamatan kerja, fasilitas pemeliharaan dan perawatan kesehatan pekerja serta pemeliharaan kondisi lingkungan kerja. Perlindungan hukum di bidang keselamatan kerja pada PT. Nestle Indoensia Waru – Sidoarjo di peroleh melalui kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk KKB dimana masing-masing pihak dapat menuntut pemenuhan haknya dengan berpegangan pada isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama tersebut. Hal itu menunjukkan pentingnya keberadaan KKB dalam upaya melindungi secara hukum kepentingan pekerja khususnya dalam bidang keselamatan kerja.
- b. Pelaksanaan program perlindungan keselamatan kerja memerlukan partisipasi baik dari pihak pengusaha maupun para pekerja dimana masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan segala ketentuan keselamatan kerja baik berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang telah disepakati bersama dalam bentuk KKB dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan program perlindungan keselamatan

... berdasarkan masukan-masukan dari para pekerja saja tapi yang terpenting bahwa tim pengawas tersebut harus turun langsung ke lapangan sehingga data-data yang diperoleh merupakan data-data konkrit atau keadaan yang sesungguhnya terjadi di tempat kerja.



kerja ini dapat berjalan optimal. Selain itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan pula adanya suatu pengawasan berkaitan dengan penegakan ketentuan keselamatan kerja, pembinaan, serta kelengkapan sarana dan prasarana menyangkut fasilitas kerja dan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Fungsi pengawasan ini pada PT. Nestle Indonesia Waru tampak dengan dibentuknya safety committee yang bertugas mengawasi serta memberi masukan bagi pihak pengusaha dalam rangka perbaikan syarat-syarat keselamatan kerja.

2. Saran

- a. Mengenai pengaturan perlindungan keselamatan kerja tidak diperoleh secara rinci dalam KKB namun demikian diatur dalam Buku Pedoman Keselamatan Kerja yang notabene dibuat oleh perusahaan secara sepihak yang seringkali kurang memperkatikan kepentingan pekerja oleh karena itu di butuhkan adanya suatu andil bagi pekerja melalui wakil-wakilnya dalam proses pembuatan Buku Pedoman Keselamatan Kerja tersebut sehingga diharapkan adanya keseimbangan hak atas perhatian kepentingan baik bagi pihak pengusaha maupun bagi para pekerja.
- b. Dalam pelaksanaan program perlindungan keselamatan kerja dibutuhkan adanya pengawasan baik itu oleh pihak perusahaan maupun pihak pekerja atau suatu institusi khusus yang dibentuk dengan tujuan mengawasi jalannya program keselamatan kerja, sebab sebagai manusia biasa selalu mempunyai sifat lalai. Tim pengawas ini dalam menjalankan tugasnya